
JURNAL WIDYA GANECWARA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) KABUPATEN WONOGIRI

Purwanto¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Suyamto²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Darsono³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Info Artikel

Kata kunci:

regulasi,
komitmen SDM,
perangkat pendukung,
regresi linier berganda.

Keywords:

regulation,
human resource
commitment,
supporting tools,
multiple linear
regression.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui berpengaruh secara parsial dan simultan regulasi, komitmen SDM, dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Wonogiri, kemudian diambil 53 orang pegawai yang terdiri dari pegawai sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala inspektorat, kepala sub bagian (keuangan, perencanaan dan pelaporan) dan kapid anggaran.

Hasil penelitian ditemukan bahwa secara parsial dan simultan regulasi, komitmen SDM, dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan di Kabupaten Wonogiri. Keberhasilan penerapan SIPKD. dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel regulasi, komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung sebesar 68,50% dan sisanya sebesar 93,20% menggambarkan adanya variabel bebas lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Abstract

The objectives of this study were to determine the partial and simultaneous effect of regulation, human resource commitment, and supporting tools on the successful implementation of SIPKD in terms of the quality of financial reports in Wonogiri District. This research was conducted at the Wonogiri District Government. The population in this study were all employees of the regional work units (SKPD) of Wonogiri Regency, then 53 employees were taken consisting of employees of the Regional secretary, head of service, head of agency, head of inspectorate, head of subdivisions (finance, planning and reporting) and district heads. budget.

The results showed that partially and simultaneously regulation, human resource commitment, and supporting tools for the successful implementation of SIPKD in terms of the quality of financial reports in Wonogiri District. Successful implementation of SIPKD. 68.50% can be explained / influenced by regulatory variables, commitment, human resources, and supporting devices and the remaining 93.20% illustrates the existence of other independent variables that are not included in this study.

✉Alamat korespondensi :

FEB UTP Surakarta

Jl. Walanda Maramis No.56, Nusukan,

Kec. Banjarsari, Kota Surakarta,

Jawa Tengah 57135

E-mail:

suyamto.feutp@gmail.com¹

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan di propinsi/kabupaten/kota khususnya terkait dengan aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, melalui kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri bersama Departemen Keuangan melaksanakan kegiatan Development of Regional Financial Management Information and Reporting System. Kegiatan tersebut menghasilkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang merupakan bagian dari Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri tahun 2008. Dimana melalui sistem SIPKD ini dilakukan proses pengembangan, penginstalan dan pengimplementasian aplikasi keuangan daerah berdasarkan internasional best practice. Komputerisasi hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 900/122/BAKD.

Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat melaksanakan ketentuan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilengkapi dengan Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan beberapa kali perubahan antara lain Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri 21 Tahun 2009 serta Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah, sehingga keandalan dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh regulasi terhadap keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan di Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan di Kabupaten Wonogiri.
4. Untuk mengetahui pengaruh perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan di Kabupaten Wonogiri.
5. Untuk mengetahui interaksi pengaruh secara bersama-sama antara regulasi, komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan SIPKD di Kabupaten Wonogiri.

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

➤ Tinjauan Pustaka

1. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPP merupakan gabungan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L) dengan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), sedangkan LKPD merupakan Laporan Keuangan masing-masing Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapat an, belanja, pembiayaan dan transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Salah satu

indikator dari kualitas laporan keuangan adalah perolehan opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya.

Adapun kualitas kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 :

- a. Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur:
 - 1) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa depan.
 - 2) Manfaat prediktif (*prediktif value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - 3) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - 4) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk

serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan munculnya otonomi daerah dalam bidang keuangan, pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah bisa merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri serta mempertanggungjawabkan sendiri. Dengan banyaknya regulasi, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat SKPD dituntut 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu : pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pertanggungjawaban keuangan diatur di dalam paket regulasi keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan berdasarkan Lampiran I Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Lampiran I Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dikelola, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai

ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.

- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyediakan informasi bagi penggunaannya mengenai:

- 1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran.
- 2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset.
- 2) Kewajiban.
- 3) Ekuitas.
- 4) Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 5) Belanja.
- 6) Transfer.
- 7) Pembiayaan.
- 8) Saldo Anggaran Lebih.

- 9) Pendapatan-Laporan Operasional (LO).
- 10) Beban, dan
- 11) Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih informasi tambahan termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

b. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial. Komponen laporan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- 3) Neraca.
- 4) Laporan Operasional.
- 5) Laporan Arus Kas.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan entitas adalah setiap Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap gubernur / bupati/ walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggungjawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut selanjutnya disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang bertindak pula sebagai Bendahara Umum Daerah. PPKD sebagai SKPKD menyusun pula laporan keuangan sebagaimana yang berlaku pada SKPD.

3. Regulasi

Perkembangan regulasi di Indonesia yang tumbuh dengan dinamis di sektor pemerintahan menjadi salah satu pemicu berkembangnya akuntansi di sektor pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi keuangan Negara telah melahirkan banyak peraturan perundangan yang mempengaruhi perkembangan akuntansi sektor publik.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Namun, setelah beberapa tahun pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menyadari bahwa isi

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan otonomi daerah yang lebih efisien. Maka dikeluarkanlah UU pengganti, yaitu : Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Perubahan Undang-Undang itu didasari oleh :

- a. Adanya semangat desentralisasi yang menekankan pada upaya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, khususnya keuangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah
- b. Adanya semangat tata kelola yang baik (*good governance*) yang mengedepankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan mendekatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Adanya konsekuensi berupa penyerahan urusan dan pendanaan (*money follow fuction*) yang mengatur hak dan kewajiban daerah terkait dengan keuangan daerah.

Perubahan regulasi yang terbilang cukup dinamis juga mencakup tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari yang awalnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Kemudian dikeluarkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Perubahan regulasi ini sangat membutuhkan sosialisasi yang cepat dan menyeluruh, selain itu juga

dibutuhkan pemahaman dari pelaksana dalam hal ini pemerintah daerah untuk memahami isi perubahan regulasi itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu penentu sukses atau tidaknya pelaksanaan hal- hal yang diamatkan oleh Undang-Undang tersebut. Jadi, aparat pemerintah daerah juga seharusnya lebih dinamis mengikuti perubahan regulasi tersebut.

4. Komitmen

Robbins dan Jugde (2013) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Dengan kata lain komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Kemudian dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/ Tugas Perbantuan

Mathis dan Jackson (2016) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa komitmen merupakan suatu bentuk loyalitas yang lebih konkrit yang dapat dilihat dari sejauhmana

karyawan mencurahkan perhatian, gagasan, dan tanggungjawab dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Luthan (2009) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi, merupakan suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah harta/asset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi/perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia (Sedarmayanti, 2017). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu system dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi (Matindas, 2010).

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Dita, 2011). Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian.

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

6. Perangkat Pendukung

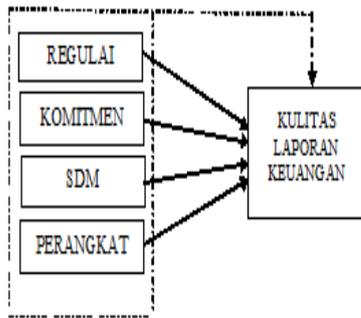
Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer, *software* dan lain lain . Menurut Mulyono (2017) perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktivitas *input*, proses dan *output* dalam sebuah sitem akuntansi. Perangkat keras ini terdiri dari computer yang memproses, perangkat penyimpanan dan perangkat untuk menghasilkan *output* serta media fisik untuk menghubungkan semua unit tersebut.

Sedangkan perangkat lunak menurut Mulyono (2017) merupakan perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang berisi program serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya. Serta aplikasi yang dibutuhkan seperti aplikasi SIPKD yang telah terpasang dengan baik di komputer yang telah disediakan. Jaringan internet juga menjadi salah satu sarana pendukung dalam proses penginputan data menggunakan aplikasi SIPKD ini.

➤ Kerangka Pemikiran

Untuk lebih jelasnya dan tidak menyimpang dari pembahasan, maka dapat penulis gambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Untuk mempermudah jalannya penelitian ini, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- Kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen (Y)
- Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat Pendukung sebagai variabel independen (X).

➤ Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan regulasi terhadap keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan komitmen terhadap keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sumber daya manusia terhadap keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan.
5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan interaksi pengaruh secara bersama-sama antara regulasi, komitmen,

sumber daya manusia, dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan SIPKD.

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Wonogiri, kemudian diambil 53 orang pegawai yang terdiri dari pegawai sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala inspektorat, kepala sub bagian (keuangan, perencanaan dan pelaporan) dan kbid anggaran.

3. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri satu variabel dependen yaitu keberhasilan penerapan SIPKD ditinjau dari kualitas laporan keuangan, dan 3 variabel independen yaitu regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kuesioner

6. Metode Analisis Data

- a. Uji Instrumen Penelitian
- b. d. Uji Prasyarat Analisis/ Uji asumsi klasik
- c. Uji Regresi Linier Berganda
- c. Uji Hipotesis

7. Hasil Analisis Data

a. Uji Instrumen Penelitian

Berdasarkan pada uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas diketahui bahwa tiap item pertanyaan valid dan reliabel memenuhi syarat untuk pengujian selanjutnya.

b. Uji Prasyarat Analisis/ Uji asumsi klasik

Telah lolos uji prasyarat analisis oleh karena itu layak untuk memprediksi analisis berikutnya.

c. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0.798 + 0.183 X_1 + 0.096 X_2 + 0.344 X_3 + 0.229 X_2 + e$$

c. Uji Hipotesis

1) Uji t

Berdasarkan pada hasil uji t keempat variabel yaitu variabel-variabel regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung, diketahui bahwa secara individual berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SIPKD. Variabel Sumber daya manusia ternyata mempunyai pengaruh yang paling dominan dari pada variabel-variabel lainnya.

2) Uji F

Sejumlah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, karena besarnya F hitung = 178,003 signifikan pada 1%.

3) Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui pengaruh variabel regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung terhadap Keberhasilan Penerapan SIPKD di Kabupaten Wonogiri, dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi (*adjusted R square*) yang memiliki nilai positif sebesar 0.932 yang menunjukkan bahwa Keberhasilan Penerapan SIPKD di Kabupaten Wonogiri, dapat dijelaskan/ dipengaruhi oleh variabel regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung sebesar 93,20% dan sisanya sebesar 6,80% menggambarkan adanya variabel bebas (*independent variable*) lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan pembahasan, dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Secara Parsial (Individual):

- a. Variabel regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya apabila pemahaman responden terhadap regulasi semakin baik, maka kualitas laporan keuangan yang dibuat juga semakin baik.
- b. Variabel komitmen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya apabila komitmen pegawai SKPD di Kabupaten Wonogiri semakin baik, maka kualitas laporan keuangan yang dibuatnya juga semakin baik.

- c. Variabel SDM berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Artinya apabila SDM di SKPD Kabupaten Wonogiri semakin baik, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Wonogiri
 - d. Variabel perangkat pendukung berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya apabila perangkat pendukung semakin baik, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Secara simultan (bersama-sama) regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Artinya apabila variabel regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung ditingkatkan secara bersamaan, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di DKPD Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan perbandingan masing-masing SCB, diketahui bahwa SDM adalah variabel paling kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan penerapan SIPKD. Artinya apabila variabel regulasi, komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung ditingkatkan secara bersama, maka sumber daya manusia yang paling kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan penerapan SIPKD.

Sedangkan besarnya koefisien determinasi (*adjusted R square*) yang memiliki nilai positif sebesar 0.932 yang menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SIPKD. dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel regulasi, komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung sebesar 68,50% dan sisanya sebesar 93,20% menggambarkan adanya variabel bebas lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayani, Made Ayu. Herawati, Nyoman Trisna dan Atmaja, Anantawikrama Tungga. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Pengendalian Intern terhadap Nilai Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi Program S1 (Volume 2 Nomor 1). Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Dita, A., (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi S1. Semarang : Universitas Diponegoro. Ferdinand, Augusty. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., (2018). Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haslinda dan Jamalludin M., (2016). Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Organisasi dengan Standar Biaya sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol II, No. 1.: 1-21.

- Ikhyanuddin (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Di Kabupaten Aceh Besar. *Journal Of Economic Management & Business*, Volume 18, Nomor 1, April 2017.
- Kintaatmaja, Hanggalih. 2015. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 11 Edisi Khusus Juni 2015 : 160- 168
- Luthan, Fred. (2009). *Perilaku Organisasi*. Edisi Pertama. Terjemahan Vivin Andika Yuwono, dkk. Yogyakarta : Andi.
- Matindas. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep 16 Ambisi Kenyataan dan Usaha*. Edisi II, , Jakarta: Grafiti.
- Mathis, Robert L. dan Jackson, John H. (2016). *Human Resources Management*. Alih Bahasa. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyono, S. (2017). Struktur Hardware Komputer. *Jurnal Struktur Komputer*. Vol. 3, Nomor I, Hal 6-7.
- Rahmansah. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tesis S2. Jakarta : Universitas Terbuka. Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. (2013). *Perilaku Organisasi*. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat. Scott, William R, (2015). *Financial Accounting Theory*. Fifth Edition. Canada Prentice Hall.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama, Bandung Simanjuntak,
- Binsar H. (2011). *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia.
- Swarmilah H. dan Veny., 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Dan Kesulitan Pencapaian Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Walikota Jakarta Barat). *Jurnal Komunikasi Ilmiah, Akuntansi dan Perpajakan*. Vo. 11, No. 2: 273-283. Wiley,
- John. (2015). *Government and Not-for-Profit Accounting : Concepts and Practice*. 4 th Edition by Michael H. Granof